

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia sendiri dilandasi oleh semangat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa, filosofi pembangunan Indonesia tercantum pada UUD 45 baik pada isi ataupun batang tubuh. Pada alenia ke keempat UUD 1945 disebutkan bahwa negara RI bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, jika dilihat dari pembukaan UUD 1945 alinea keempat terjadi kontradiktif antara tujuan dan implementasinya, pembangunan di Indonesia masih tertumpu pada pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara sentralisasi sehingga mendorong ketidakmerataan pembangunan dan muncul kesenjangan satu daerah dengan daerah lainnya. Kesenjangan-kesenjangan inilah yang dapat meningkatkan kemiskinan, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, serta akses kesehatan yang kurang berkualitas.

QS. Al-Anfal 8:75.

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah”

Artinya Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin. Ini berarti Islam telah meletakkan modal pertama bagi terciptanya jaminan sosial. Nafkah itu bukan hanya sekedar anjuran yang baik, tapi merupakan satu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla

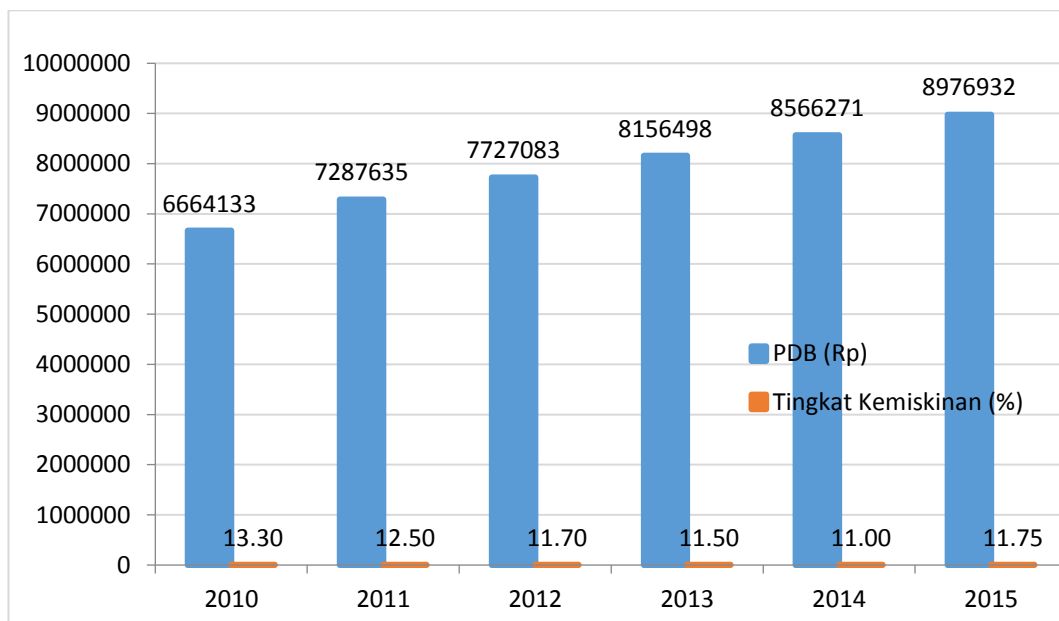
untuk dilaksanakan. Syari'at Islam juga telah merinci ketentuan-ketentuannya dalam bab nafkah kepada keluarga. Hal ini tidak terdapat pada syari'at-syari'at yang terdahulu, juga tidak terdapat dalam undang-undang modern dewasa ini.”

Masalah kemiskinan tampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia, termasuk di Indonesia upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena kemiskinan merendahkan harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan merupakan acuan penting dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Menurut Frisdiantara et al., (2016), pembangunan berkaitan dengan berbagai macam aspek baik aspek ekonomi maupun non ekonomi. Pembangunan mampu merubah tatanan struktur sosial, sikap hidup masyarakat, dan perubahan kelembagaan pemerintah baik di daerah ataupun tingkat nasional. Pembangunan mampu dioptimalkan dengan syarat setiap stakeholder mampu berperan dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan distribusi ketersediaan bahan pokok masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat baik dibidang ekonomi, bidang sosial dalam kehidupannya. Menurut BPS, pembangunan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Suatu negara dengan

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menunjukkan kemajuan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah mencerminkan keterbatasan kemampuan perekonomian suatu negara dengan menghasilkan output dalam perekonomian.

Pembangunan dalam sebuah negara dapat diukur dengan PDB. PDB adalah nilai akhir dari produk (barang dan jasa) yang mampu diproduksi di sebuah negara dalam jangka waktu tertentu, termasuk produk yang diproduksi oleh warga asing di negara tersebut. Menurut Todaro, pembangunan yang hanya memandang mengenai sisi ekonomi saja, akan gagal dalam memperbaiki taraf hidup (kesejahteraan) masyarakatnya (Muchlas et al., 2015).



Sumber : (Bank Indonesia, 2015), (Data, 2016), (Indonesia Investments, 2015)

Grafik 1. 1

Grafik Tingkat Kemiskinan dan Product Domestic Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2010-2015

Berdasarkan gambar 1.1 yang di atas melihat bahwa dari tahun ke tahun pendapatan nasional menggunakan PDB, dari tahun 2010-2015 terus mengalami peningkatan. Dengan tersebut direspon baik dengan tingkat kemiskinan yang mengalami penurunan dari tahun 2010-2015. Dari masalah kemiskinan tersebut PBB berinisiatif untuk membuat program MDGs yaitu pembangunan yang dilaksanakan dengan berbagai aspek sosial maupun ekonomi di negara-negara berkembang. MDGs memiliki 8 tujuan besar. Tujuh diantaranya dikhususkan untuk negara berkembang , yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, mengurangi HIV/AIDS,

Malaria dan penyakit menular lainnya, menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong pembangunan berkesinambungan.

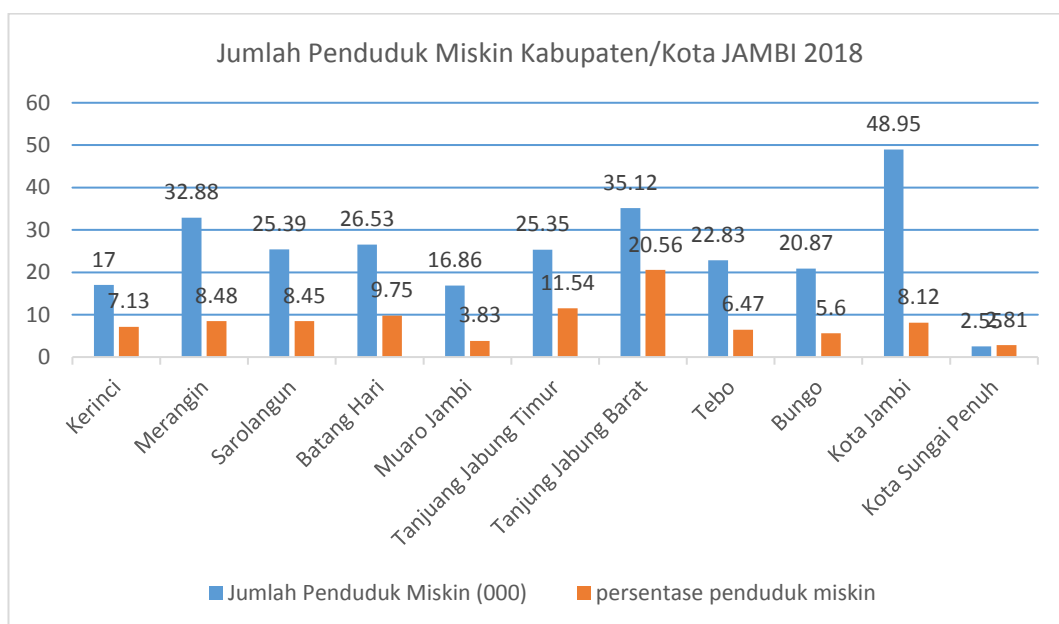
Adapun perbedaan antara SDGs dengan MDGs, salah satu perbedaannya adalah MDGs hanya mempunyai 8 tujuan sedangkan SDG memiliki 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target, oleh sebab itu SDGs mempunyai cakupan yang lebih luas dan akan mampu lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.

Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari kepulauan dan kondisi geografis, sehingga dengan kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahannya. Pemerintah sulit untuk melakukan koordinasi pemerintahan yang terdapat di daerah yang diakibatkan oleh daerah yang memiliki kepulauan yang luas. Untuk itu diperlukan adanya penataan sistem pemerintah yang dapat berjalan secara efisien serta mandiri yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut akan didukung dengan adanya perbedaan sumber daya antar daerah, maka dibutuhkan suatu sistem yang mampu mempermudah sumber daya yang dapat menjadi sumber pendapatan setiap daerah sekaligus bisa menjadi pendapatan nasional. Sehingga pemerintah menganut sistem desentralisasi (Yapan's, 2014).

Ramasundaram (2013) pekerja pedesaan telah turun secara signifikan karena peluang pekerjaan yang disediakan di bawah skema dan pendapatan

upah telah digunakan terutama untuk memenuhi pengeluaran seperti makanan, pendidikan, perawatan kesehatan. Yang mengindikasikan bahwa hal itu telah membantu dalam menurunkan kemiskinan di Indonesia daerah pedesaan.

Desentralisasi merupakan sebuah pendekatan dan teknik manajemen yang berkenaan dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari sebuah tingkat pemerintah kepada tingkat yang lebih rendah. Sehingga diharapkan pemerintah daerah juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian SDGs. Proses Perumusan SDGs tidak terlepas dari masukan ataupun aspirasi dari pemerintah daerah. Melalui asosiasi kota dan pemerintah daerah di tingkat global, peran pemerintah sangat aktif dalam ikut andil dalam perumusan dan pengesahan SDGs. Maka muncul slogan bagi pemerintah daerah yakni “SDGs adalah kita”. Hal ini menunjukkan peranan penting pemerintah kota dan kabupaten dalam mewujudkan agenda pembangunan SDGs diseluruh dunia terutama di Kabupaten Batang Hari.



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2018)

Grafik 1. 2

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota JAMBI 2018

Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Jambi diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Batang Hari menjadi Kabupaten dengan angka kemiskinan nomor keempat dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 26.53. Sebagai daerah yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi membuat Kabupaten Batang Hari menjadi salah satu daerah untuk melakukan sasaran implementasi SDGs. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka memperdayakan dan meningkatkan derajat kesejahteraan terhadap keluarga miskin melalui program diantaranya yaitu Program Keluarga Harapan, RASKIN, dan UHC. Menjadi program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs membuat pelaksanaan Program dituntut untuk terus dapat mencapai target serta dapat menanggulangi kemiskinan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Di daerah adanya kebebasan otonomi daerah, memberikan wewenang pada pemerintah dalam implementasi SDGs di daerahnya. Dengan adanya tujuan SDGs untuk mengurangi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan, Kabupaten Batang Hari dikenal sebagai Kabupaten yang termiskin ke empat dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi.

Untuk meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di Kabupaten Batang Hari, khususnya masalah fakir miskin dan masalah

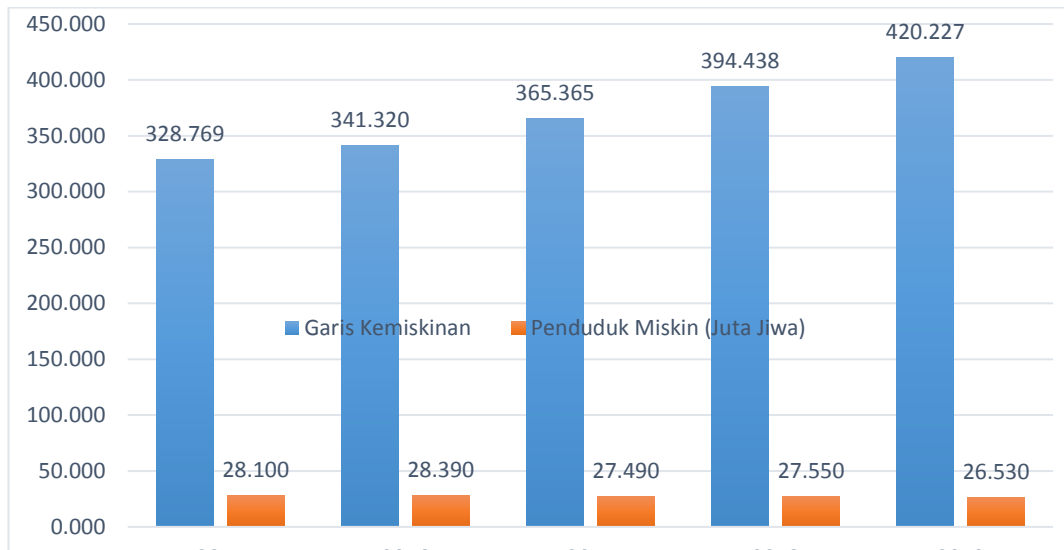
kesehatan, maka pemerintah setempat melalui Dinas Sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Batang Hari. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan, RASKIN, dan *Universal Health Coveral*. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan di bidang sosial. Sebagai salah satu program yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 2011.

Nurdiana (2017) mengatakan Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan PKH di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian.

Suparti (2017) mengatakan bahwa RASKIN merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Tahun 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan membantu masyarakat miskin melalui Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dalam

memenuhi kebutuhan pangan adalah melalui Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan beras dan penyaluran beras oleh pemerintah atau perberasan nasional. Mengacu kepada peraturan presiden diatas, jelas bahwa program beras masuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

Pemerintah Batang Hari mengimplementasikan tujuan SDGs nomor (1) mengentaskan kemiskinan, (3) kesehatan dan kesejahteraan untuk semua. SDGs tersebut diterapkan dalam program-program pengetasan kemiskinan antara lain, Program Keluarga Harapan, RASKIN, dan *Universal Health Coverage*. Semua program tersebut ditunjukan untuk mengurangi kemiskinan di Batang Hari.



Sumber : Badan Pusat Statistik, (2019)

Grafik 1. 3

Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Batang Hari tahun 2015-2019

Dengan adanya program percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu berupa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta program lainnya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut. Dengan adanya program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Batang Hari, garis kemiskinan di Batang Hari mengalami peningkatan. Dari tahun 2015, garis kemiskinan meningkat hingga tahun 2019 sebesar 420.227. Meskipun angka garis kemiskinan terus mengalami peningkatan, tingkat kemiskinan di Batang Hari masih termasuk daerah paling banyak memiliki warga miskin di Provinsi Jambi. Banyaknya penduduk miskin di Batang Hari yang diakibatkan oleh adanya penurunan harga-harga komoditas seperti karet dan kelapa sawit secara

signifikan, dengan tersebut akan mempengaruhi tingkat penghasilan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut maka, penulis bermaksud melakukan penelitian terkait dengan judul : “Analisis Implementasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Batang Hari”.

B. Batasan Masalah

Mengingat tujuan dari Implementasi SDGs yang multidimensional, pada penelitian ini dibatasi pada analisis program-program yang merupakan implementasi SDGs pemerintah Kabupaten Batang Hari yaitu Program Keluarga Harapan, RASKIN, dan *Universal Health Coverage* . Dalam penelitian ini program pengentasan kemiskinan di katakan berhasil apabila terdapat kenaikan pendapat penerima program.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan penelitian ini akan dibatasi dalam bentuk pertanyaan dasar yang perlu memperoleh jawaban dari penelitian tersebut, yaitu antara lain :

1. Bagaimana Implementasi SDGs di Kabupaten Batang Hari?
2. Apa yang menjadi Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program SDGs di Kabupaten Batang Hari?
3. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam Implementasi Program SDGs di Kabupaten Batang Hari?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penerapan SDGs di Kabupaten Batang Hari yaitu:

1. Mengetahui penerapan SDGs di Kabupaten Batang Hari.
2. Mengetahui Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi SDGs di Kabupaten Batang Hari.
3. Mengetahui strategi pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan Implementasi SDGs untuk mengurangi kemiskinan di daerahnya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain adalah :

1. Bagi Peneliti, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peneliti mengenai materi yang dibahas maupun metode yang digunakan dalam meneliti khususnya yang terkait dengan pembangunan dan penerapan SDGs untuk mengurangi ketimpangan di masyarakat daerah.
2. Bagi Pemerintah, mengetahui pelaksanaan SDGs di tingkat bawah, serta mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu untuk pemerintah daerah lain bisa menjadi salah satu masukan untuk menerapkan program pengentasan kemiskinan.

3. Bagi Masyarakat, mampu membantu masyarakat untuk lebih mengetahui program pengentasan kemiskinan, sehingga diharapkan mampu berperan serta dalam pelaksanaan SDGs untuk mencapai kesejahteraan.
4. Bagi Peneliti Lain, dapat memberikan gambaran atau pengetahuan bagaimana proses pengembangan masyarakat terkait masalah penerapan SDGs sehingga nantinya mampu dikembangkan menjadi penelitian yang lebih luas.